

## **BAB II**

### **KERJASAMA INDONESIA-RUSIA DALAM BIDANG MILITER**

#### **A. Postur Militer Kedua Negara**

##### **1. Indonesia (Postur TNI)**

Ketika kita berbicara tentang postur militer Indonesia, kita tidak pernah bisa lepas dari pembicaraan mengenai peranan TNI. Berdasarkan catatan yang ada, postur kekuatan TNI sampai tahun 2006, tepatnya sampai tanggal 16 Agustus 2006, sebanyak 369.389 prajurit yang terdiri dari 273.693 prajurit TNI AD, 68.180 prajurit TNI AL, dan 27.590 prajurit TNI AU.<sup>1</sup> Tidak selalu kuantitas yang besar dari postur kekuatan TNI menjadi jaminan yang baik dan memadai bagi kekuatan TNI itu sendiri. Demikian juga sebaliknya, kuantitas yang kecil tidak serta merta kekuatan TNI kemudian menjadi lemah dan tidak efektif. Tapi jika kita melihat kondisi Alutsista TNI yang sebagian besar usianya antara 25-40 tahun, dan ini yang terus dipelihara dan diperbaiki agar siap dioperasikan, maka kita harus jujur secara kualitas postur kekuatan TNI masih jauh dari standar dan belum memenuhi kebutuhan Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) atau Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP).

Berdasarkan data Kekuatan Marta Darat, kendaraan tempur dari berbagai jenis sebanyak 872 unit, dan yang siap dioperasikan sebanyak 71,79%, kendaraan motor dari berbagai jenis sebanyak 25.716 unit yang siap dioperasikan 85,04% dan pesawat terbang dari berbagai jenis 61 unit yang siap operasi sekitar 53,51%.

---

<sup>1</sup> Connie Rahakundini Bakrie, PERTAHANAN NEGARA DAN POSTUR TNI IDEAL, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 102.

Kekuatan Matra Laut; kapal perang (KRI) sebanyak 133 unit yang siap dioperasikan 50,82%, kendaraan tempur mariner dari berbagai jenis sebanyak 435 unit yang siap operasional hanya 36,09%, pesawat terbang 71 unit yang siap operasional 52%. Terakhir, kekuatan Matra Udara; pesawat terbang dari berbagai jenis 251 unit yang siap operasi hanya 45,82% dan radar 16 unit yang siap operasi hanya 18,75%.

Kondisi nyata postur kekuatan TNI pada tahun 2006 pada dasarnya sudah sesuai dengan target yang harus dicapai pada akhir program lima tahun pertama, 2000-2005, yaitu sebanyak 363.191 prajurit. Tapi pada saat bersamaan kita juga mencatat bahwa pemenuhan materiil dan Alutsista yang ditargetkan dapat mencapai 70% kelihatannya belum terpenuhi, dan ini sangat berkaitan dengan terbatasnya kemampuan dukungan anggaran Negara.

#### **a. TNI AD**

Untuk melihat lebih jelasnya tentang postur kekuatan TNI, adalah dengan mengkaji postur TNI AD sebagai salah satu element dari kekuatan pertahanan Indonesia. Proyeksi kemampuan tempur TNI AD sejauh ini adalah untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai pasukan pemukul strategis dengan tujuan menghancurkan ancaman strategis di seluruh wilayah tanah air, mampu menyelenggarakan pertahanan wilayah darat maupun mencegah infiltrasi serta dapat menahan, melokalisir, dan mengagalkan serbuan lawan. Selain dari pada itu, proyeksi kemampuan TNI AD adalah untuk mampu menyelenggarakan operasi khusus dan melaksanakan pertahanan udara dalam rangka melindungi obyek-obyek vital. Namun dalam upaya memenuhi proyeksi tersebut, kekuatan TNI AD yang bertumpu pada Ranpur (Kendaraan Tempur), Ranmor (Kendaraan Motor), dan pesawat terbang saat ini, ternyata masih memiliki banyak kelemahan.

Sejauh ini TNI AD terdiri dari 2 divisi infantry Kostrad, 2 Grup Parako, 1 Grup Sadha dan 1 Satuan Gultor Koppasus serta 12 Kodam sebagai kekuatan kewilayahan dengan total prajurit sebanyak 276.502 orang dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 52.588 orang dengan kesiapan operasi 78%. Diharapkan pada akhir tahun 2009, terdapat penambahan prajurit TNI AD hingga menjadi 352.431 orang dan PNS menjadi 53.740 orang.

Kekuatan Ranpur sejumlah 934 unit, yang siap dioperasikan hanya sebesar 634 unit atau sebanyak 67,88% dan diharapkan pada akhir tahun 2009, Ranpur akan bertambah 272 unit tank, 1.215 unit Rantis (Kendaraan Taktis) dan 573 Ransus (Kendaraan Khusus). Sedangkan untuk Ranmor, daris ebanyak 59.842 unit, yang sipa dioperasikan hanya 52.165 unit (87,17%) sedangkan untuk pesawat terbang, dari 59 unit, hanya sebanyak 26 unit atau sebesar 44,06% yang siap operasi. diharapkan pada akhir tahun 2009 akan bertambah sebanyak 43 unit helicopter serbu (*attack helicopter*).<sup>2</sup>

Pada tahun 2014, kekuatan TNI AD diharapkan telah terbentuk 3 Divisi Konstrad (7 Brigade infantry yang terdiri dari 21 Yonif), 2 Resimen Armed (7 Batalion Armed), 2 Yonkav, 2 Yonarhanudri, 3 Yonzipur dan Satbanmin sebanyak 3 batalion dan 7 Kompi unsure pendukung administrasi. Koppasus terdiri dari 2 Grup parako, 1 Grup Sadha, 2 Yon Gultor dan 1 Dennik Gultor sserta kekuatan kewilayahan yang terdiri dari 13 Kodam dengan kekuatan 44 Korem, 278 Kodim, 6 Brigif dengan 85 Yonif, Satbanpur 48 Yon dengan kekuatan personil 100%. Kekuatan Ranpur menjadi 1.583 unit dan pesawat terbang dari berbagai jenis menjadi 122 unit.

---

<sup>2</sup> Ibid., hal. 105.

Semua daftar dari proyeksi kekuatan TNI AD ke depan ini lagi-lagi akan sangat berkaitan dengan masalah anggaran. Terlihat bahwa anggaran TNI AD mengalami kenaikan rata-rata sekitar 15% per tahun sejak tahun 2000, tetapi jumlah tersebut masih tidak mencukupi kebutuhan. Untuk melihat lebih jauh alasan tidak memadainya anggaran yang ada, kita perlu mencermatinya secara lebih mendalam dan mendetail.

#### **b. TNI AL**

Sebagai Negara dengan luas wilayah yang besar dan terdiri dari banyak pulau di samping 5 kepulauan utama (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian jaya atau Papua), kita tidak bisa menutup mata menegani pentingnya kekuatan TNI AL di Indonesia. Mengacu pada pernyataan Kasal, Laksamana Slamet Soebijanto, sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 tahun 2004, TNI AL telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang berupa Postur TNI AL tahun 2005-2024, rencana pembangunan jangka menengah dalam bentuk Renstra TNI AL tahun 2005-2009, dan rencana pembangunan jangka pendek dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan. Pembangunan postur TNI AL tahun 2005-2024 yang telah ditetapkan masih didasarkan pada keterbatasan anggaran yang disediakan pemerintah, hal ini mengingat bahwa kondisi perekonomian Negara masih belum stabil. Sebagai konsekuensinya, kekuatan TNI AL masih dibangun pada tataran minimal essential forces dan belum pada tataran ideal untuk menjalankan tugas secara maksimal.<sup>3</sup>

Memang ada keterkaitan yang erat antara anggaran militer dengan pembangunan ekonomi. Karenanya terkait dengan kebutuhan anggaran TNI AL

---

<sup>3</sup> "Berita Hankam", dalam [http://beritahankam.blogspot.com/2011\\_01\\_02\\_archive.html](http://beritahankam.blogspot.com/2011_01_02_archive.html), diakses 24 Agustus 2011.

selama 15 tahun ke depan, maka pembangunan ekonomi, atau persisnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi keuangan Negara, akan sangat berpengaruh, jika tidak mau dikatakan sangat menentukan. Jika demikian masakahnya, tidak mengeherankan jika TNI AL sendiri dalam banyak hal sering mengalami persoalan dalam melakukan prediksi kebutuhan anggaran. Namun demikian, menurut Kasal, TNI AL memiliki visi untuk membangun angkatan laut setara dengan kekuatan *Green Water Navy* yang disegani dikawasan Asia. Direncanakan melalui proses pengadaan Alutsista baru dan pemeliharaan Alutsista yang dapat dipertahankan serta menghapus Alutsista yang sudah using (expired), maka TNI AL pada tahun 2024 diharapkan memiliki 274 KRI, 137 pesawat udara, 3 Pasmal, dan 11 Pangkalan Utama.

Menurut Menteri Pertahanan mengenai kondisi kekuatan angkatan laut, kemampuan pertahanan TNI AL merupakan bentuk profesionalitas prajurit dan kesiapan Alutsista untuk melaksanakan kegiatan *naval diplomasi* serta penegakan kedaulatan melalui penggelaran operasi dan pelatihan.<sup>4</sup> Secara umum gelar operasi unsure-unsur laut sampai saat ini masih dapat dikatakan memenuhi komitmen penugasan TNI AL. Namun harus diakui bahwa masih terdapat berbagai kelemahan, terutama menyangkut konsep gelar operasi, seperti tumpang tindih wilayah dan waktu operasi, penggunaan satu unsur untuk melaksanakan lebih dari satu tugas operasi, disamping belum optimalnya penggunaan data intelijen dalam menentukan sasaran operasi.

---

<sup>4</sup> “Tingkatkan Profesionalisme, Kopaska TNI AL dan US. Navy Seal Saling “Jajal””, dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7238>, diakses 24 Agustus 2011.

Secara idealnya, atau berdasarkan rancangannya, tumpuan kekuatan Alutsista TNI AL didasarkan pada kesiapan operasional kapal tempur maupun kapal angkut, pesawat udara dan Ranpur Marinir yang diintegrasikan ke dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Namun dalam kenyataannya, dari sebanyak 207 unit KAL (Kapal Angkatan Laut) dari berbagai jenis, yang siap operasi hanya sebanyak 76 unit atau hanya sebanyak 36,71%. Sedangkan dari sebanyak 435 unit Ranpur (Kendaraan Tempur) Marinir dari berbagai jenis, hanya sebesar 157 unit yang siap dioperasikan atau hanya sebesar 36,09%. Pesawat udara yang dimiliki TNI AL saat ini berjumlah 75 unit, namun hanya 52% dari jumlah tersebut yang dapat dioperasikan atau sebanyak 32 unit pesawat udara.

Tentu dengan kondisi yang terbatas tersebut, tanpa bermaksud untuk mengajukan alibi, upaya penangkalan TNI AL terhadap segala tindak pidana perompakan di laut sudah dapat dipastikan kurang mendapatkan hasil yang maksimal. Kita mencatat adanya peningkatan kasus perompakan di wilayah Indonesia. Pada tahun 2003 misalnya, terdapat 52 kasus dan menjadi 67 pada tahun 2004. Ini artinya, terjadi peningkatan sebesar 28,8%. Meskipun demikian, dengan keterbatasan yang ada, dari penggelaran operasi pada tahun 2004, TNI AL berhasil melakukan penindakan terhadap 142 kasus pelanggaran (pelayaran, kehutanan, dan perikanan), sehingga kita dapat menyelamatkan kekayaan Negara sekitar Rp 31,5 miliar.<sup>5</sup>

### **c. TNI AU**

Apabila kita mengacu pada penjelasan Kasau, Marsekal Udara TNI Herman Prayitno, maka kebijakan postur TNI AU pada tahun 2000-2004 telah

---

<sup>5</sup> Ibid,

diperbaharui dan disempurnakan menjadi tahun 2005-2024.<sup>6</sup> Dengan sisa kurun waktu 17 tahun ke depan, maka pencapaiannya selama ini dilakukan secara bertahap dan lagi-lagi disesuaikan dengan kemampuan Negara. Secara umum agak berbeda dengan kedua angkatan lainnya, pendekatan kekuatan udara tidak didasarkan pada jumlah orang, tetapi jumlah Alutsista, seperti pesawat, radar, rudal, dan lainnya, yang diawaki sesuai dengan standar Alutsista tersebut. Maka dari itu, TNI AU tidak mengenal satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan sebagainya. TNI AU mengelompokkan kekuatannya dalam system senjata udara, yaitu; pesawat (tempur, angkut, helicopter), radar, rudal, dan pangkalan.

Secara umum, berdasarkan Kasau, terdapat kesenjangan yang besar antara antara kekuatan nyata TNI AU saat ini dengan kebutuhan kekuatan minimum-ideal TNI AU yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan udara berdasarkan jumlah dan fungsi skadron. Jika kita menghitung dari jumlah keseluruhan skadron TNI AU saat ini dan dibandingkan dengan kebutuhan minimum-ideal, maka terdapat kekurangan sebesar 63,6%.

Saat ini jumlah radar yang dimiliki oleh TNI AU hanya ada sebanyak 16 unit dan dengan kesiapan operasi hanya 14 unit atau 87,5%. Artinya, jumlah radar yang siap operasi guna mempertahankan dan mengamankan wilayah udara nasional saat ini dengan kebutuhan ideal minimum kekuatan TNI AU yang telah diterapkan oleh Mabes AU (30 unit radar) masih terdapat kesenjangan yang sangat jauh, lebih dari 50%. Pada saat bersamaan, dalam rangka pemantapan kemampuan pesawat TNI AU dalam mempertahankan wilayah udara nasional, abik satuan tempur maupun satuan angkut, saat ini hanya didukung oleh 107 unit

---

<sup>6</sup> Conni Rahakundini Bakrie, Ibid, hal. 112.

pesawat dari berbagai jenis dari sebanyak 246 unit pesawat yang dimiliki. Artinya, di samping rendahnya kekuatan radar dalam menjaga wilayah udara nasional, kesiapan operasi pesawat TNI AU pun tidak lebih dari 44%.

Masalah utamanya tampaknya memang tidak jauh-jauh yakni masalah anggaran. Dukungan anggaran juga yang dihadapi oleh TNI AU dalam mewujudkan pembangunan postur TNI AU ke depan. Kondisi ini memang telah menjadi persoalan klasik TNI dari tahun ke tahun, seperti diungkapkan oleh Panglima TNI, Marsekal Udara Djoko Suyanto. Secara umum, pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran sekitar 30% dari semua perencanaan kebutuhan ideal TNI. Dengan anggaran yang terbatas tersebut TNI hanya mampu mengganti Alutsista yang sudah tua dan memelihara yang layak dipakai. Berdasarkan laporan dari ketiga Angkatan TNI dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2005-2009, Alutsista TNI pada umumnya sudah sangat tua, yang dapat dipelihara dan diperbaiki agar tetap dapat digunakan, tetapi diantaranya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Jika ditinjau dari segi kualitas masih jauh dari standar, karena sebagian besar usianya antara 25-40 tahun. Sedangkan kekuatan prajurit TNI AU sendiri saat ini sebesar 27.850 orang dan direncanakan pada tahun 2014 bertambah menjadi 38.268 orang.<sup>7</sup> Artinya prajurit TNI AU diharapkan mengalami kenaikan sebanyak 10.418 orang atau meningkat sebanyak 37,4% dari jumlah yang ada saat ini.

## **2. Rusia**

Rusia mewarisi sebagian besar kekuatan militer Uni Soviet, namun kesulitan ekonomi yang melanda Rusia membuatnya kesulitan membiayai

---

<sup>7</sup> “Ganyang Malaysia”, dalam [http://9anyang-malingsial.blogspot.com/2009\\_09\\_01\\_archive.html](http://9anyang-malingsial.blogspot.com/2009_09_01_archive.html), diakses 28 Agustus 2011.



kekuatan militernya. Yang paling sulit dirasakan Angkatan Laut yang banyak membesituakan armadanya, termasuk kapal-kapal induknya sehingga saat ini hanya memiliki satu kapal saja. Setelah musibah kapal selam Kursk di Laut Barents pada tahun 2000, kekhawatiran berbagai pihak bahwa Angkatan Laut Rusia dalam waktu dekat akan musnah bertambah. Hal yang sama dialami oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udara, namun keduanya tidak separah Angkatan Laut karena masih mengadakan riset untuk memperbaharui persenjataan yang dimilikinya meskipun tidak semaju Amerika Serikat maupun pada masa Uni Soviet.<sup>8</sup>

Rusia masih memiliki persenjataan nuklir warisan Uni Soviet yang sebagian diduga dimiliki oleh negara-negara federasinya dan juga oleh negara-negara yang kini independen seperti Ukraina dan Kazakstan.

Uni Soviet dahulu memiliki stasiun peluncur ruang angkasa (kosmodrom) di Baikonur, namun kosmodrom tersebut saat ini berada di wilayah Kazakstan dengan berpenduduk Rusia-Kazakh dan memiliki tingkat kriminalitas tertinggi. Untuk itu Rusia merasa perlu untuk mencari stasiun pengganti untuk kepentingan ruang angkasa baik kepentingan sipil, bisnis, dan militer.

Pada masa Uni Soviet, terdapat dinas rahasia yang dikenal dengan nama KGB. Pada masa Presiden Boris Yeltsin dibentuk dinas keamanan yang bernama FSB.

#### **a. Anggaran Produksi Senjata Rusia**

Di era kepemimpinan Presiden (sekarang PM) Vladimir Putin, Rusia yang dulunya bernama Uni Soviet akhirnya bangkit kembali setelah negaranya diabrak-

---

<sup>8</sup> “Rusia”, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia>, diakses 30 Juli 2011.

abrik Amerika bersama sekutunya di era 70-90-an. Rusia yang “miskin” di era 1990-an, kini Rusia tumbuh menjadi negara dengan ekonomi dan militer kuat bersama China.<sup>9</sup>

Ditengah badai krisis keuangan yang melanda Amerika dan Uni Eropa, pada 22 Desember 2008, Deputy I Ketua Komisi Industri Militer Rusia, menyatakan anggaran militer Rusia (2009-2011) mencapai US 35.3 miliar (setara Rp 378 triliun ). Dana ini digunakan untuk membiayai produksi persenjataan dan peralatan militer. “Dalam realitanya, anggaran pengeluaran selama tahun ini akan mencapai 1 triliun ruble “, kata Vladislav Putilin.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah menyetujui permintaan anggaran Departemen Pertahanan Rusia 2009-2011 sebesar 4 triliun ruble (1510 triliun rupiah). [Angka ini jauh lebih besar dari APBN Indonesia yang kurang dari 1000 triliun]. Rusia juga merencanakan pada perbaikan kualitas lebih dari 400 persenjataan baru, material, dan komponen peralatan militer.

Selama kurun waktu 2009-2011, Russian akan menambahkan 70 rudal strategis, 30 rudal Iskander, dan sejumlah jet dan pesawat pengangkut. Putilin menambahkan, “Rusia akan membeli 38 pesawat tempur, 6 pesawat pengintai, lebih 60 helikopter, 14 kapal perang, dan hampir 300 tank dan lebih 2000 kendaraan tempur. ”

## **b. Menyikapi Kekuatan Militer**

Meningkatnya anggaran militer China, Rusia, India dan Brazil akhir-akhir tahun ini menunjukkan kebangkitan keempat negara “the new superpower” di

---

<sup>9</sup> “Menyikapi Kekuatan Militer Rusia”, dalam <http://nusantaranews.wordpress.com/2008/12/23/menyikapi-kekuatan-militer-rusia/>, diakses 30 Juli 2011.

abad 21 ini. Kebangkitan ekonomi selalu diikuti dengan peningkatan belanja militer.

Jika diteliti, kekuatan militer rupanya merupakan salah satu cara untuk memperkuat posisi bargaining baik secara politik, ekonomi maupun teknologi terhadap negara lain. Selama lebih dari 2 dasawarsa, Rusia “sangat jengkel” terhadap pihak yang membuat Uni Sovietnya hancur di tahun 1991. Kejengkelan Rusia semakin menjadi-jadi ketika “sekutu Rusia” seperti Georgia, Ukraini, Kosovo jatuh ke pihak anti Rusia melalui Revolusi yang didalangi Amerika Serikat.<sup>10</sup>

Kesempatan memperbesar militernya tanpa penolakan negara-negara dunia pun tiba. Pada saat Amerika berencana membangun sistem pertahanan misil di negara bekas sekutu Rusia di Eropa Tengah (Polandia, Ceko), dan bersamaan dengan kebangkrutan ekonomi AS, Rusia dengan leluasa meningkatkan kekuatan militernya dengan alasan “menpertahankan wilayahnya dari serangan sekutu Amerika”. Kondisi ini berbeda dengan China, sewaktu meningkatkan anggaran militernya di tahun 2003,2004,2005,2006, China mendapat kritikan politis dari AS, Jepang, Australia dan Uni Eropa. [Rusia berhasil memanfaatkan momen "kecerobohan" AS].

Dalam periode singkat ini, peningkatan kekuatan militer Rusia hanyalah untuk membendung sekaligus membawa “teman-teman” lamanya (bekas sekutu dan wilayah Rusia) yang telah dihasut oleh AS & sekutu untuk kembali bergabung dengan Rusia. Hal lain adalah untuk meningkatkan posisi bargaining-nya di dunia internasional, baik dalam ekonomi, perdagangan, politik dan batas

---

<sup>10</sup> “Kekuatan Militer Baru: Rusia”, dalam <http://rio-militer.blogspot.com/>, diakses 28 Agustus 2011.

teritori. Selain itu, Rusia ingin kembali me”renaissance” seperti Uni Soviet tempo dulu.

### **3. Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia-Rusia**

Sebuah analisis yang dipublikasikan Global Fire Power belum lama ini memberikan evidence yang obyektif untuk menunjukkan peta kekuatan militer negara-negara di seluruh dunia. Berdasarkan uji data yang mendukung kekuatan militer, daya tahan, stamina dan survival yang mendukungnya, Indonesia berada pada tempat terhormat, di urutan ke 18, menduduki puncak klasemen di kawasan ASEAN, bahkan mengungguli kekuatan Australia yang ada di posisi ke 24 ranking militer seluruh dunia.<sup>11</sup>

Urutan 10 besar ranking militer se dunia dipegang secara berturut-turut : AS, Rusia, China, India, Inggris, Turki, Korsel, Perancis, Jepang dan Israel. Kemudian urutan 11 sampai dengan 20 besar adalah Brasil, Iran, Jerman, Taiwan, Pakistan, Mesir, Italia, Indonesia, Thailand dan Ukraina. Ranking negara ASEAN yang lain adalah Filipina ada di posisi ke 23, Malaysia posisi ke 27, Singapura ke 41.

Analisis ini memberikan sebuah definisi tentang peta kekuatan militer yang sesungguhnya, tidak terfokus pada keunggulan jumlah pesawat tempur atau kapal combatan seperti yang selama ini menjadi opini publik. Itu sebabnya walaupun Singapura punya kekuatan pesawat tempur terbanyak di ASEAN, negara pulau itu tetap tidak mampu mengungguli Malaysia, Filipina dan

---

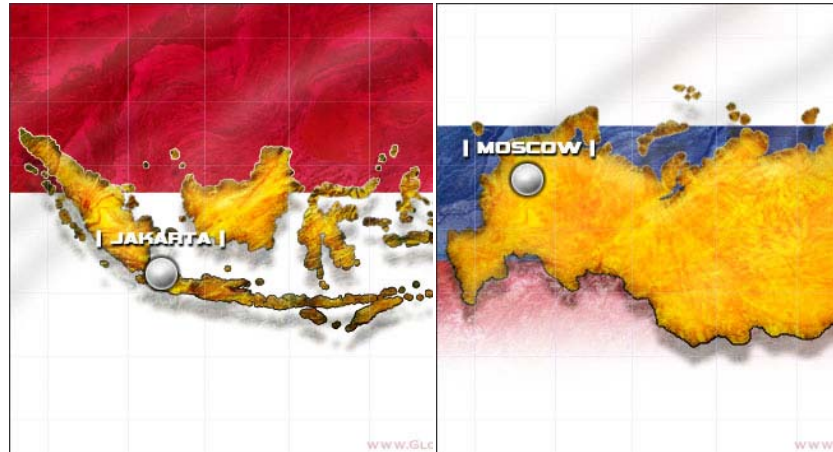
<sup>11</sup> “Kekuatan Militer Indonesia ranking 18 Dunia”, dalam <http://hankam.kompasiana.com/2011/08/04/kekuatan-militer-indonesia-ranking-18-dunia/>, diakses 28 Agustus 2011.

Indonesia. Indikator kekuatan alutsista bukan merupakan faktor penentu keunggulan militer sebuah negara.

Kita selama ini terpengaruh dengan opini psikologis bahwa Jakarta akan hancur dalam waktu dua jam jika diserang oleh pesawat tempur Singapura. Padahal apa iya, ini kan negara kepulauan yang paling besar di dunia, punya 240 juta penduduk berkarakter nasionalis, sumber daya alamnya melimpah dan yang terpenting dalam strategi militer, negara kita terdiri dari ribuan titik pertahanan. Bandingkan dengan negara pulau itu, hanya beberapa titik di sebuah pulau. Secara hankam, pulau itu lebih mudah ditaklukkan. Yang jelas angkatan udara tidak menjadi faktor utama untuk memenangkan pertempuran karena ibu dari segala perang adalah angkatan darat.

Sekedar perbandingan, berikut disampaikan peta kekuatan militer antara Indonesia dan Rusia berdasarkan analisis Global Fire Power;

**Comparison of Indonesia and the Russian Military Forces  
(Perbandingan Kekutan Militer Indonesia dan Rusia)<sup>12</sup>**



	Indonesia	Russia
<b>CURRENT GFP RANK</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
<b>Total Population</b>	245,613,043	138,739,892
<b>Military Manpower Available</b>	129,075,188	69,117,271
<b>Fit for Military Service</b>	107,538,660	46,812,553
<b>Reaching Military Age Yearly</b>	4,455,159	1,354,202
<b>Active Military Personnel</b>	438,410	1,200,000

<sup>12</sup> “Compare Countries Results”, dalam <http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp>, diakses 14 Agustus 2011.

<b>Active Military Reserves</b>	400,000	754,000
<b>Total Aircraft</b>	510	2,749
<b>Total Land- Based Weapons</b>	1,577	91,715
<b>Total Naval Units</b>	136	233
<b>Towed Artillery</b>	59	12,765
<b>Merchant Marine Strength</b>	1,244	1,097
<b>Major Ports and Terminals</b>	9	7
<b>Aircraft Carriers</b>	0	1
<b>Destroyers</b>	0	14
<b>Frigates</b>	6	5
<b>Submarines</b>	2	48
<b>Patrol Coastal Craft</b>	31	60
<b>Mine Warfare Craft</b>	12	34
<b>Amphibious Operations Craft</b>	8	23
<b>Defense Budget / Expenditure</b>	\$4,740,000,000	\$56,000,000,000
<b>Foreign Reserves</b>	\$96,210,000,000	\$483,100,000,000

<b>Purchasing Power</b>	\$1,030,000,000,000	\$2,223,000,000,000
<b>Oil Production</b>	1,023,000 bbl	10,120,000 bbl
<b>Oil Consumption</b>	1,115,000 bbl	2,740,000 bbl
<b>Proven Oil Reserves</b>	4,050,000,000 bbl	74,200,000,000 bbl
<b>Total Labor Force</b>	116,500,000	75,550,000
<b>Roadway Coverage</b>	437,759 km	982,000 km
<b>Railway Coverage</b>	5,042 km	87,157 km
<b>Waterway Coverage</b>	21,579 km	102,000 km
<b>Coastline Coverage</b>	54,716 km	37,653 km
<b>Major Serviceable Airports</b>	684	1,213
<b>Square Land Area</b>	1,904,569 km	17,098,242 km



## **B. Sejarah Kerjasama Militer Indonesia-Rusia**

### **1. Hubungan Bilateral Indonesia-Rusia (Uni Soviet) Era Perang Dingin**

Indonesia dan Rusia pernah menjadi sekutu dan menjalin hubungan yang erat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Kedekatan hubungan kedua Negara ini terjalin khususnya dalam hal kerjasama militer. Secara historik terdapat dasar sejarah yang melandasi terjadinya kerjasama militer antara kedua Negara tersebut. Catatan yang dibuat oleh pedagang Afanasy Nikitin dari kota Tver mengenai “perjalanannya melampaui tiga laut” – perjalanan ke India (pada tahun 1466-1472) menyampaikan data pertama kepada orang Rusia mengenai adanya suatu negara misterius bernama Shabot yang terletak di Asia Tenggara.<sup>13</sup> Menurut pendapat para ilmuwan apa yang dimaksudkan dengan nama tersebut adalah negara Indonesia dengan pusatnya di pulau Sumatera. Dalam naskah A. Nikitin tercantum data menarik mengenai letaknya negara dongeng yang jauh itu, mengenai kekayaan alamnya, adat-istiadat dan tradisi rakyatnya. Menurut catatannya negara Shabot yang terletak diantara India dan Cina, telah menjalin hubungan dagang dengan tetangganya dari Utara.

Indonesia selalu menarik perhatian orang Rusia. Nusantara tropis ini berkali-kali dikunjungi oleh pengembara dan peneliti dari Rusia. Pada awal abad ke-XVI Indonesia dikuasai oleh penjajah dari Eropa. Pada mulanya penjajahnya adalah bangsa Portugis. Setelah “armada agungnya” hancur pada tahun 1588, Portugis yang pada waktu itu bergabung dengan Spanyol, kehilangan Indonesia: dari tangan Portugis Indonesia direbut oleh bangsa Belanda. Pada tahun 1602 pedagang Belanda mendirikan “Syarikat Hindia – Timur Belanda (V.O.C)” yang

---

<sup>13</sup> “MENGENAI SEJARAH HUBUNGAN RUSIA-INDONESIA”, dalam <http://djajoelie.blogspot.com/2010/01/mengenai-sejarah-hubungan-rusia.html>, diakses 28 Juli 2011.

memperoleh hak untuk mempunyai tentara sendiri, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, mengeluarkan uang dan sebagainya. Indonesia menjadi milik Belanda selama 350 tahun. Dalam kurun waktu tersebut rakyat Indonesia memberontak 50 kali melawan penjajahan Belanda.

Pada abad ke-XIX Belanda menghadapi perlawanan gigih dari rakyat Kesultanan Aceh (Sumatera Utara). Dalam usahanya memecahkan konflik Aceh dengan Belanda, Sultan Aceh mencari dukungan dari negara lainnya termasuk dari Rusia juga.

Pada tahun 1879 selagi kapal layar Rusia “Vsadnik” melabuh di Penang, delegasi yang terdiri dari wakil-wakil pemberontak Aceh menghubungi kapten kapal tersebut dengan “permohonan kepada Yang Mulia Sang Pemimpin Imperator agar negara mereka memperoleh kewarganegaraan Rusia”.<sup>14</sup> Kementrian Kelautan melapor kepada Tzar mengenai permohonan tersebut yang memerintahkan mengalihkannya kepada Kementrian Luar Negeri. Jawaban Kementrian Luar Negeri kepada Kementrian Kelautan menyatakan bahwa pada saat ini Menteri Luar Negeri berpendapat bahwa tidak mungkin “membahas masalah mengenai masuknya rakyat Aceh menjadi warganegara Rusia berhubung di kemudian hari hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman diantara Pemerintahan Imperator dengan Belanda”.

Pada tanggal 15 Februari 1904, yang mengemban tugas Konsul Rusia di Singapura, Rudanovskiy memberitahukan bahwa Sultan Aceh menyampaikan kepada Konsulat surat permohonan yang dialamatkan kepada Nikolay II tentang permohonan untuk menerima daerah kekuasaannya dibawah perlindungan Rusia.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Kementrian Luar Negeri pada tanggal 24 April 1904 menyampaikan kepada Konsulat Rusia di Singapura bahwa “menurut kesimpulan departemen kelautan yang dihubungi dalam hal ini, bahwa permohonan tersebut tidak mungkin dikabulkan. Maka berdasarkan hal tersebut dan dengan memperhatikan pula bahwa dari segi lain mengabulkan permohonan Sultan dapat menyebabkan kesulitan yang tak diharapkan dengan pihak Belanda yang mempunyai koloni di bagian selatan pulau tersebut, kami mohon agar Anda dengan perkataan yang ramah menolak usulan tersebut dari Sultan Aceh”.<sup>15</sup>

Sebagai akibat dari pengaktifan politik luar negeri di kawasan Timur Jauh pada tahun 90-an di abad ke-XIX, Pemerintah Rusia memperlihatkan perhatiannya terhadap Indonesia. Kapal-kapal militer Rusia dalam pelayarannya ke Vladivostok mulai lebih sering memasuki pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1885, telah dibuka wakil-konsulat tidak tetap Rusia di Batavia (nama Jakarta pada zaman itu). Sesuai dengan saran dari Kementrian Kelautan pada tahun 1893 konsulat tersebut dirubah menjadi konsulat tetap. Namun pembukaan konsulat tidak mendorong perluasan hubungan diantara Rusia dan Indonesia. Perdagangan diantara kedua negara tersebut tidak dijalankan secara langsung, melainkan melalui Belanda, Jerman dan Inggris pada umumnya.

Konsul tetap Rusia di Batavia yang pertama dan terakhir, M.M.Bakunin bertugas selama lima tahun (1895 –1899). Tidak hanya sekali beliau mengajukan usulan yang berdasar mengenai pembukaan hubungan dagang langsung diantara Rusia dan Indonesia. Misalnya M.M. Bakunin mengusulkan agar komite Armada Sukarela membuka rute pelayaran reguler diantara Odessa dan Vladivostok

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

dengan singgah di salah satu pelabuhan Indonesia. Disamping ini M.M. Bakunin mengusulkan agar membuat percobaan kultivasi teh Jawa, tembakau Sumatera (delhi) dan tumbuhan lainnya di kawasan selatan Rusia. Namun usulan tersebut tidak mendapat dukungan di lingkungan pemerintahan.

Maka dengan kenyataan demikian pemeliharaan Konsulat tetap Rusia di Batavia menjadi sia-sia, sehingga pada tahun 1899 statusnya diturunkan menjadi tidak tetap, dan pada tahun 1913 konsulat ditutup.

Indonesia yang secara politis tergantung penuh kepada Belanda, tidak berhak untuk mempunyai perwakilan di luar negeri atau menjalin hubungan dengan negara tetangga sekalipun. Seluruh hubungan luar negeri Indonesia dalam bidang ekonomi berada dibawah pengawasan total administrasi kolonial Belanda.

Pada bulan Maret 1942 penguasa Belanda di Indonesia menyerah kepada tentara Jepang yang kemudian menduduki Negara Indonesia.<sup>16</sup>

Setelah Uni Soviet mengumumkan perang terhadap Jepang, dalam suasana kekalahan telak militaris Jepang, pada umumnya terjadi peningkatan gerakan kemerdekaan-pembebasan di kawasan Timur, wakil-wakil gerakan patriotik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menjadi Presiden pertama Republik, Wakil-Presiden – M.Hatta. Namun Belanda tidak menghentikan usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya dan akhirnya berhasil menduduki kembali sebagian besar wilayah Indonesia. Dalam sidang PBB pada bulan Januari 1946 Uni Soviet yang pertama menentang aksi Belanda terhadap Indonesia.

---

<sup>16</sup> “Sejarah Nusantara (1942-1945)”, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Nusantara\\_%281942-1945%29](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_%281942-1945%29), diakses 28 Agustus 2011.

Pada Januari 1949, Konferensi 19 negara Asia di New Delhi mengajukan tuntutan ke Dewan Keamanan PBB untuk memaksa Belanda membebaskan wilayah yang diduduki dan memberikan kepada Indonesia kedaulatan penuh sebelum tanggal 1 Januari 1950. Pada akhirnya Belanda terpaksa duduk di meja perundingan dengan wakil-wakil Indonesia yang diselenggarakan di Den Haag pada Agustus 1949.<sup>17</sup>

Segera setelah selesainya perundingan, pada tanggal 24 Desember 1949 Duta Besar Belanda di Moscow, Wisser, menyerahkan Nota kepada Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet A.A.Gromyko, yang menyatakan bahwa sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai di Den Haag diantara Belanda dan delegasi Indonesia pada tanggal 2 Nopember 1949 dan yang telah diratifikasikan oleh parlemen semua negara yang berkepentingan, pada tanggal 27 Desember 1949 dalam upacara resmi, Republik Serikat Indonesia akan menerima kedaulatan penuh atas seluruh wilayah Hindia Belanda dengan perkecualian New Guinea Belanda (Irian Barat), dan dengan akte tersebut Republik Indonesia Serikat akan dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Dalam Nota tersebut Pemerintah Belanda juga menyampaikan harapan bahwa “setelah pemberian kedaulatan Pemerintah Uni Soviet akan mengakui negara baru”.

Pada 27 Desember 1949 seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, kecuali Irian Barat diserahkan kepada kedaulatan Indonesia.

Pada 25 Januari 1950 A.A.Gromyko menyerahkan Nota Jawaban kepada Duta Wisser dimana Kementrian Luar Negeri Uni Soviet memberitahukan kepada

---

<sup>17</sup> “MENGENAI SEJARAH HUBUNGAN RUSIA-INDONESIA”, dalam [http://www.indonesia.mid.ru/relat\\_ind\\_04.html](http://www.indonesia.mid.ru/relat_ind_04.html), diakses 28 Agustus 2011.

Pemerintah Belanda bahwa “dikarenakan pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag diadakan upacara penyerahan kedaulatan, maka Pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk memberitahukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat bahwa Pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat, dan menjalin hubungan diplomatik”.<sup>18</sup>

Pada waktu yang sama A.Y. Vyshinskiy mengirim telegram kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat Hatta yang menyatakan bahwa “Pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat dan menjalin hubungan diplomatik”.

Pengumuman resmi TASS mengenai pengakuan Uni Soviet terhadap Indonesia diterbitkan pada tanggal 26 Januari 1950.

Berita mengenai akte tersebut dari Pemerintah Uni Soviet diterima di Indonesia dengan antusias. Pers Jakarta mengapresiasikannya dengan banyaknya publikasi pengumuman dan komentar. Koran ibukota “Merdeka” menerbitkan berita di halaman muka, dengan judul dengan huruf besar “Rusia Soviet mengakui Republik Indonesia Serikat” menempatkan informasi bahwa Menlu Indonesia telah menerima pengumuman resmi dari Pemerintah Rusia mengenai pengakuan Republik. Ditekankan pula bahwa tokoh terkemuka politik dan negarawan Republik telah “menilai positif pengakuan tersebut”. Beberapa anggota pemerintah dan wakil-wakil dari lingkungan penguasa di Jakarta menyampaikan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

pendapatnya bahwa berkat pengakuan tersebut bertambah pula kesempatan bagi Republik Indonesia Serikat untuk menjadi anggota PBB.

Pada tanggal 2 Pebruari 1950 diselenggarakan sidang kabinet menteri Republik dimana disahkan jawaban pihak Indonesia atas pengumuman Pemerintah Soviet tertanggal 25 Januari 1950. Dalam telegram jawaban Menteri Luar Negeri Indonesia M. Hatta, yang dikirim dari Jakarta ke Moscow pada tanggal 3 Pebruari 1950 mengkonfirmasi diterimanya telegram dengan keputusan Pemerintah Uni Soviet yang mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat dan merencanakan menjalin hubungan diplomatik.

Tanggal diterimanya jawaban positif dari Pemerintah Indonesia (3 Pebruari 1950) atas pemberitahuan Pemerintah Soviet mengenai pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dijadikan tanggal pembukaan resmi hubungan diplomatik diantara kedua negara tersebut.

Pada pertengahan bulan Pebruari, Pemerintah Indonesia mendapat usulan dari Pemerintah Soviet untuk memulai pembicaraan. Dalam telegramnya Kementrian Luar Negeri Uni Soviet tertanggal 15 Pebruari 1950 memberitahukan: “Ada dua cara untuk mengadakan pembicaraan, yaitu apakah Anda mengutus wakilnya, atau kami mengutus wakil kami kepada Anda. Kami menyetujui kedua cara tersebut dan kami ingin tahu mana yang lebih berkenan untuk Anda?. Pihak kami menyetujui kedua-duanya.”<sup>19</sup>

Pada 21 Pebruari 1950 Hatta mengirim telegram kepada A.Y.Vyshinskiy dimana beliau menyatakan: “dengan rasa puas kami menyampaikan bahwa kami

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

menerima usulan Anda. Kami akan mengutus wakil-wakil kami untuk mengadakan perundingan. Mengenai tanggal dan susunan delegasi akan kami beritahukan selanjutnya melalui telegram”.

Masyarakat Indonesia membahas secara luas perspektif-perspektif hubungan Soviet-Indonesia: misalnya, pada awal bulan Maret anggota Parlemen dari Partai Nasional Manai Sophian mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah mengenai rencana lanjutannya guna menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Pada tanggal 11 Maret, dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, M. Hatta mengumumkan bahwa kini sedang dilakukan pembentukan delegasi Pemerintah yang dikepalai oleh L.N.Palar untuk melaksanakan pembicaraan di Moskow mengenai langkah-langkah konkrit dalam rangka menjalin hubungan diplomatik.

Pada tanggal 11 April, Hatta mengirim telegram kepada A.Y.Vyshinskiy dimana beliau menyatakan: “Delegasi Indonesia dalam rangka mengadakan pembicaraan mengenai pertukaran misi diplomatik berangkat dari Jakarta ke Moscow pada tanggal 15 April 1950”.

Dalam susunan delegasi Indonesia terdapat Lambertus Nicodemus Palar – kepala delegasi, Sujono Hadinoto – pemimpin fraksi PNI di parlemen, Jusuf Wibisono – anggota parlemen, wakil ketua partai Masyumi, dan Mohammad Yamin – ketua seksi parlemen untuk bidang urusan luar negeri, beserta Rubiyono – sekretaris dan Nuradi – penerjemah.

Delegasi tiba di Moskow pada tanggal 29 April. Pada tanggal 3 Mei kepala delegasi menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Uni Soviet A.Y.Vyshinskiy surat dari Perdana menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat,



M.Hatta yang menyatakan bahwa Palar diberikan wewenang untuk mengadakan pembicaraan mengenai pertukaran perwakilan diplomatik dengan Uni Soviet.

Pada tanggal 3 dan 5 Mei delegasi diterima oleh A.Y.Vyshinskiy. Waktu resepsi pada tanggal 5 Mei Palar menyatakan bahwa keputusan Pemerintah Uni Soviet untuk mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat memberi harapan bagi masyarakat Indonesia bahwa Uni Soviet akan mendukung permintaan Indonesia menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa. Palar menambahkan bahwa hal ini dikaitkan Pemerintah Indonesia dengan pertukaran perwakilan diplomatik diantara Uni Soviet dan Indonesia.

Atas pernyataan Palar A.Y.Vyshinskiy menjawab bahwa “pada pembahasan di Persatuan Bangsa-Bangsa, permintaan Indonesia untuk menjadi anggota PBB, Pemerintah Soviet akan membahas masalah ini dengan bertimbang rasa”.<sup>20</sup>

Palar menyampaikan juga pertimbangannya bahwa sebelum pertukaran perwakilan diplomatik dilakukan sebaiknya diawali dengan pengiriman kelompok kecil oleh masing-masing negara, yaitu Uni Soviet ke Jakarta dan Indonesia ke Moscow guna melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk mempersiapkan penempatan perwakilan. (Pada pembicaraan telah disepakati bahwa perwakilan akan mempunyai status kedutaan).

Pertanyaan Vyshinskiy bagaimana pendapat delegasi mengenai pembicaraan lanjutan, dijawab oleh Palar: langkah-langkah berikutnya harus berupa pertukaran Nota-Nota mengenai perjanjian diplomatik untuk masing-masing Duta.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Setibanya di Jakarta pada tanggal 15 Mei Palar menyatakan bahwa delegasi telah menyelesaikan tugas yang diberikan dan beliau sendiri puas dengan hasil pembicaraan di Moscow. Pada malam hari yang sama Palar, Hadinoto, Wibisono dan Yamin diterima oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 16 Mei, Kabinet Menteri Republik Indonesia mendengarkan laporan delegasi mengenai hasil pembicaraan di Uni Soviet. Dalam sidang tersebut Soekarno turut hadir. Komunike resmi yang dipublikasikan setelah sidang, menyatakan mengenai tercapainya persetujuan diantara Uni Soviet dan Indonesia untuk mengadakan pertukaran kedutaan dan didapatkannya dukungan dari pemerintah Uni Soviet terhadap keanggotaan Indonesia di PBB.

Pada bulan Agustus 1950 Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan 34 negara.<sup>21</sup>

Kementrian Luar Negeri Indonesia menghadapi tugas berat, yaitu mendirikan misi diplomatiknya, terutama di negara-negara terbesar di dunia, serta melengkapi susunan kepegawaian dengan kader-kader nasional. Pada akhir tahun Indonesia telah mempunyai 28 misi diluar negeri dengan status yang berbeda-beda: 17 – di Asia, 6 – di Eropa, 4 – di Amerika, dan 1- di Afrika. Pada keseluruhan ke-28 misi ini bekerja 94 diplomat dan pegawai konsulat Indonesia. Akibat tidak adanya tenaga kerja sendiri yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup, maka untuk tahap awal terpaksa mengundang beberapa diplomat Belanda untuk bekerja di dinas luar negeri Republik Indonesia. Selanjutnya dengan bertahap seluruh diplomat Belanda digantikan oleh orang Indonesia.

---

<sup>21</sup> “Sejarah Indonesia”, dalam <http://syadiashare.com/sinopsis-sejarah-indonesia.html>, diakses 28 Agustus 2011.

Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, pada bulan September 1950 Uni Soviet membantu Indonesia menjadi anggota PBB.<sup>22</sup>

Pada tanggal 9 Pebruari 1953, wakil kepala komisi bidang urusan luar negeri Dewan Perwakilan Rakyat O.Rondonuwu (kelompok nasionalis), anggota parlemen D.Gondokusumo (Partai Rakyat Nasional), Asraruddin (Partai Buruh), Djokoprawiro (Partai Indonesia Agung) dan M.Nitimihardjo (partai Murba) mengajukan kepada Dewan agar membahas proyek resolusi mengenai pertukaran secepatnya perwakilan diplomatik dengan Uni Soviet. Pencipta draft resolusi menyatakan bahwa “politik luar negeri Indonesia yang netral akan belum sempurna sampai dengan Uni Soviet dan Indonesia melaksanakan pertukaran perwakilan diplomatik...Pembukaan kedutaan akan memperbesar kesempatan untuk menukarkan bahan baku dari Indonesia, misalnya karet, dengan peralatan industri dari Rusia”.

Pada tanggal 9 April 1953 Dewan Perwakilan Rakyat dengan 82 suara setuju dan 42 suara tidak setuju, menyetujui resolusi O.Rondonuwu mengenai pertukaran perwakilan dengan Uni Soviet pada tahun yang sama, yaitu 1953.

Pada sidang VIII DK PBB yang dilakukan pada September 1953 di New York, Menteri Luar Negeri Indonesia Soekarno secara lisan memberitahukan kepada kepala delegasi Soviet A.Y.Vyshinskiy mengenai niat pemerintah Indonesia membuka kedutaannya di Uni Soviet. Sebagai penegasannya pada 30 Nopember, Sunaryo mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Uni Soviet dimana sekali lagi dinyatakan mengenai niat pemerintah Indonesia membuka kedutaannya di Moscow dalam waktu dekat. “Saya akan sangat berterima kasih

---

<sup>22</sup> “Soekarno: Nasionalis tapi Fanatik (Rusia-Indoensia)”, dalam <http://bossgahutagalung.wordpress.com/tag/masjid-sukarno/>, diakses 28 Agustus 2011.

apabila Bapak Yang Mulia memberitahukan apakah usulan ini dapat diterima oleh Pemerintah Uni Soviet”.<sup>23</sup>

Pada tanggal 17 Desember, Menteri Luar Negeri Uni Soviet menginformasikan Sunaryo bahwa “usulan dari Pemerintah Indonesia tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Soviet. Pada gilirannya Pemerintah Soviet siap mengirim Duta Besar Uni Soviet ke Jakarta”.

Pada upacara penyerahan surat kepercayaan kepada Kepala Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet K.E.Voroshilov di Kremlin, yang diadakan pada tanggal 13 April 1954, Duta Besar Indonesia pertama untuk Uni Soviet Subandrio atas nama pemerintahnya menyatakan bahwa rakyat Indonesia telah lama mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan diplomatik, serta hubungan persahabatan yang erat diantara kedua negara. Duta Besar menekankan bahwa menjalin hubungan persahabatan yang didasari persamaan hak, baik dengan Uni Soviet maupun dengan negara-negara dan masyarakat dunia lainnya, membuka kesempatan bagi Republik Indonesia membuat hubungan erat dengan Uni Soviet dalam bidang ekonomi, yang mana akan membuka kesempatan menggunakan kemajuan teknik dan pengalaman Uni Soviet dengan tujuan menaikkan taraf hidup rakyat Indonesia.

Perdana Menteri Sastroamidjoyo pada tanggal 16 Agustus 1954 melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelaksanaan keputusannya mengenai pertukaran perwakilan diplomatik dengan Uni Soviet. Dia memberitahukan anggotanya mengenai keikutsertaan Indonesia dalam kerja beberapa konferensi internasional. Seiring dengan keikutsertaan dalam sidang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Majelis Umum PBB, Indonesia mengirim delegasinya untuk ikut rapat Dana Moneter Internasional, MOT, konferensi mengenai permasalahan pelayaran (Ceylon), ke Konferensi Islam Ekonomi Internasional (KII) di Karachi dan pertemuan internasional lainnya.

Pada tanggal 14 September 1954 Duta Besar Luar Biasa dan Dengan Kuasa Penuh Uni Soviet di Indonesia D.A.Zhukov datang ke Jakarta.<sup>24</sup> Beliau memberikan pengumuman kepada pers dimana atas nama rakyat Uni Soviet beliau menyampaikan sambutan yang hangat serta kehendak agar rakyat Indonesia memperoleh kebahagiaan, kemakmuran, dan meyakinkan bahwa “perkembangan hubungan diplomatik diantara Uni Soviet dan Republik Indonesia akan mempunyai dampak positif terhadap perluasan kerjasama negara kita dalam bidang politik, ekonomi dan budaya, yang mana akan mendorong perluasan dan penguatan persahabatan, serta mengabdikan pada kepentingan perdamaian dunia dan keamanan internasional”.

Pada tanggal 20 September, Duta Besar D.A.Zhukov menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Soekarno. Dalam Dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet K.E.Voroshilov secara khusus menekankan bahwa “dengan menganut politik yang memperlerat hubungan antara negara-negara dan dengan keinginan mengembangkan hubungan persahabatan diantara Uni Soviet dan Indonesia, maka Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet memutuskan dan di hadapan Anda mengangkat Tuan

---

<sup>24</sup> “Hubungan Bilateral Rusia-Indonesia”, dalam [http://www.indonesia.mid.ru/relat\\_ind\\_04.html](http://www.indonesia.mid.ru/relat_ind_04.html), diakses 28 Agustus 2011.

Dmitriy Aleksandrovich Zhukov menjadi Duta Besar kami yang Luar Biasa dan Dengan Kuasa Penuh “.<sup>25</sup>

Dokumen pertama, yang merupakan suatu hasil periode awal dalam hubungan diantara Uni Soviet dan Indonesia adalah Pernyataan Bersama Uni Soviet – Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 11 September 1956 di Moscow oleh Wakil Satu Menteri Luar Negeri Uni Soviet A.A.Gromyko dan Menteri Luar Negeri Indonesia R. Abdulgani. Isi dokumen tersebut membuktikan bahwa hubungan didirikan atas dasar lima prinsip yang diketahui oleh seluruh dunia, yaitu saling menghormati keutuhan teritori dan kedaulatan, tidak menyerang, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara, persamaan dan saling menguntungkan, hidup berdampingan secara damai.

Dalam pernyataan bersama ditandai juga dengan tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai pengaturan kerjasama dalam bidang perdagangan dan ekonomi-teknik yang dilakukan berdasarkan prinsip persamaan dan saling menguntungkan. Keputusan Uni Soviet dan Indonesia untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang militer, budaya, melakukan pertukaran delegasi, mahasiswa dan budayawan mempunyai arti penting dalam tercapainya pengertian yang mendalam diantara kedua negara.

## **2. Hubungan Bilateral Indonesia-Rusia Paska Perang Dingin**

Hubungan Indonesia dan Rusia mencapai puncaknya pasca perang dingin. Saat itu Indonesia sedang berseteru dengan Belanda pasal Irian Barat. Untuk mengimbangi kekuatan Belanda akhirnya Indonesia membeli peralatan militer dalam skala besar pada Rusia. Itulah pemicu Indonesia menjadi salah satu

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

kekuatan militer terbesar di saat itu. Meski saat ini hubungan Indonesia dan Rusia tidak semesra dulu, namun Rusia tetap menganggap Indonesia sebagai negara yang pantas untuk mereka jadikan mitra. Bahkan dari kabar yang terhembus, produk-produk militer yang kita beli dari Rusia ada yang versinya sama persis dengan militer Rusia. Biasanya bila menjual produk-produk militer ke negara lain Rusia hanya memberikan versi downgrade.<sup>26</sup>

Setelah mengalami kerenggangan selama masa perang dingin, hubungan Indonesia-Rusia ditengarai semakin kental. Data menunjukkan adanya kemajuan besar di semua aspek. Kini kedua bangsa harus lebih bergandeng tangan untuk saling mengisi demi kemakmuran kedua bangsa dengan kegiatan kongkrit.

Itulah kesimpulan kecil dari kegiatan ulang tahun diplomatik Indonesia dan Rusia ke-60 yang dilihat dalam sebuah seminar di Akademi Diplomatik Moskow (6/04).<sup>27</sup> Dibawah sinar matahari yang temaram, acara ulang tahun dihadiri oleh Wakil Menlu Rusia, Alexey N. Borodavkin, Rektor Akademi Diplomatik, Prof. AN Panov, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, Andri Hadi, mantan Mendag Luhut Panjaitan, kalangan swasta, akademisi dan budayawan dari kedua belah pihak.

Dalam pernyataan pembukanya Wakil Menlu Rusia dengan tegas menyatakan, perkembangan positif dalam beberapa waktu belakangan sangat terkait dengan dengan basis sejarah yang tidak bisa dibantah. Hubungan keduanya sudah dimulai sejak abad ke-17 di masa Raja Peter I dimana Indonesia dikenal

---

<sup>26</sup> “Indonesiaku”, dalam <http://mylandandwaters.blogspot.com/2011/01/6-negara-yang-punya-hubungan-khusus.html>, diakses 30 Juli 2011.

<sup>27</sup> “Dari Diskusi Peringatan 60 tahun hubungan Diplomatik Indonesia-Rusia: SAHABAT LAMA DI ERA BARU”, dalam <http://www.deplu.go.id/moscow/Pages/Embassies.aspx?IDP=17&l=id>, diakses 30 Juli 2011.

oleh peneliti Rusia sebagai “Negeri Kepulauan”. Tahun 1806, Ivan Kruzernter dan Yuri Lisyansky sempat singgah di Selat Malaka dalam pelayarannya keliling dunia. Bahkan karena perdagangan kedua Negara makin maju maka tahun 1894 didirikan konsulat Rusia di Batavia.

Hubungan keduanya juga menghangat pada masa Orde Lama (1950-1965) dimana Indonesia dan Rusia berangkul dalam kepentingan idiologi yang antara lain dimanifestasikan dalam kerjasama pertahanan dan pendidikan. Sayang, keduanya menjadi “terbelah” oleh perang dingin dan sempat menjauh selama Orde Baru yang menggemborkan sentimen anti komunis. Seiring dengan reformasi proses dan perestroika, hubungan keduanya kembali membaik.

Borodavkin mencatat, kerjasama di masa kini semakin kental dan dimanifestasikan dalam banyak bidang seperti di PBB, G-20, APEC dan organisasi internasional lainnya. “Dalam hal ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia sehingga Rusia dapat aktif dalam forum ASEM,” katanya. “Sebaliknya, saya jamin bahwa kita juga akan membantu Indonesia khususnya di bidang tanggap darurat,” tambahnya.<sup>28</sup>

Dubes Hamid Awaludin menggarisbawahi bahwa hubungan mesra tersebut juga direalisasikan dengan makin banyaknya turis ke Indonesia yang mencapai nyaris 70 ribu orang (2009), kerjasama pendidikan yang merunyak dan banyaknya mahasiswa-mahasiswi Rusia yang kembali tertarik mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Di bidang ekonomi, kerjasama bidang perdagangan meningkat signifikan pada kisaran 1 milyar dalam dua tahun berakhir. “You will be forgotten, no way,” ujar Hamid di hadapan 100an peserta seminar.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*



Uniknya kedua bangsa memiliki kesamaan masalah yang dihadapi dalam pembangunan modern civilization yakni varian suku, bangsa, agama dan bahasa. Tanpa penanganan yang tepat, aneka perbedaan tersebut dapat menimbulkan hambatan pembangunan yang serius. Karenanya, A. Dugov, professor dari Institut Oriental Studies, Moskow, menyarankan untuk mempelajari asal muasal permasalahan (root causes). Sejalan dengan itu, Andri Hadi mengusulkan ditingkatkannya dialog budaya dan agama untuk menurunkan tingkat ketegangan. “Itu bisa dilakukan melalui pemberdayaan kaum moderat, pendidikan, toleransi dan kesadaran globalisasi,” katanya.

Sementara itu Luhut Panjaitan menyarankan agar kedua bangsa harus mulai melakukan kegiatan yang kongkrit dalam banyak bidang. Tidak lagi bicara wacana. Menghindari penandatanganan MoU bila tidak dilaksanakan. Bahkan, perlu dilakukan evaluasi atas berbagai kegiatan yang pernah diupayakan agar hasilnya menjadi terukur.

Tidak pelak, kini kedua belah pihak harus aktif mengisi kesempatan yang ada tanpa harus menunggu dan menunda. “Kalau hubungan Indonesia dan Rusia bisa diibaratkan ritme kehidupan, maka kini kita sedang dalam posisi yang menanjak,” kata Agus Sriyono, Wakil Dubes RI Moskow

### **C. Bentuk Kerjasama Militer Indonesia-Rusia**

Setelah berakhirnya perang dingin, kerjasama militer Indoensia-Rusia menemukan momentumnya ketika kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Rusia pada tahun 2003. Kunjungan ini menghasilkan beberapa dasar kesepakatan kerjasama bilateral, termasuk kerjasama militer Indonesia-Rusia.

Kerjasama militer ini kemudian diaplikasikan dalam dua bentuk kerjasama, yaitu kerjasama pertahanan dan kerjasama teknik militer.

### **1. Kerjasama Pertahanan Indonesia-Rusia**

Relasi Rusia-Indonesia meraih momentum baru setelah lama agak vakum. Arus balik memang sedang terjadi dalam hubungan kedua negara.

Dalam kunjungannya ke Rusia pada 29 November hingga 1 Desember 2006, Presiden Yudhoyono menandatangani 12 kesepakatan kerjasama, termasuk rencana kerjasama bidang militer untuk periode 2006-2010.<sup>29</sup>

Menurut Suripto, alih teknologi dalam bidang militer sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak terus bergantung pada negara luar yang sistem persenjataannya lebih maju.

"Kerjasama dengan Rusia ini memang merupakan salah satu cara Indonesia untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap AS dalam bidang persenjataan yang sekarang ini sudah mencapai 65 persen, tetapi jangan sampai keluar dari ketergantungan yang satu masuk kepada ketergantungan yang lain," katanya.<sup>30</sup>

Suripto mengatakan jika Indonesia mengimpor senjata, maka akan menghadapi konsekuensi, yaitu sistem persenjataan yang berbeda dengan sistem dalam negeri.

---

<sup>29</sup> "PENGAMAT:PERLU ALIH TEKNOLOGI DALAM KERJASAMA MILITER RI-RUSIA", dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7283>, diakses 30 Juli 2011.

<sup>30</sup> *Ibid.*

"Misalnya, sistem radar yang diproduksi oleh Rusia belum tentu sama dengan sistem radar Indonesia, sehingga membutuhkan penyesuaian yang cukup lama dan para penggunanya akan mengalami kesulitan," ujarnya.

Namun, jika Indonesia sudah dapat memproduksi sendiri peralatan tersebut, maka masalah perbedaan sistem persenjataan tersebut tidak akan terjadi, katanya.

Sementara itu, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakrie, mantan wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengatakan kerjasama militer dengan Rusia sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme militer Indonesia yang sekarang ini kekurangan perlengkapan militer.

"Harus ada alih teknologi dalam rangka kemandirian militer Indonesia, selain itu fungsi praktisnya salah satunya adalah untuk menanggulangi masalah pencurian sumber daya alam kita di lautan. Selama ini banyak sekali alat kontrol militer kita untuk mengawasi laut terluar kita sudah `collapse` dan kita membutuhkan regenerasi alat yang baru," ujarnya.

Menurut Syahnakrie, Rusia sejak tahun 50an dan 60an merupakan mitra kerjasam militer Indonesia yang sungguh terpercaya dan dapat dihandalkan.

"Banyak produksi alat militer Rusia seperti MI17 sudah diakui kualitasnya oleh dunia internasional, sehingga sangat signifikan Rusia dipilih sebagai mitra kerjasama militer Indonesia selain AS, India ataupun Cina," tambahnya.

Pada hari pertama kunjungannya ke Rusia, Presiden Yudhoyono dijadwalkan mengunjungi St. Petersburg dan menuju Moskow pada hari kedua guna membicarakan hubungan bilateral.

Pada kesempatan sebelumnya Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail M Bely mengatakan bahwa dalam pertemuan dua kepala negara juga akan dibicarakan mengenai rencana Indonesia mengajukan pinjaman negara senilai 1 miliar dolar AS.

Kedua negara kini menjajaki kerja sama lebih erat dan luas setelah mencapai kesepakatan kerja sama dalam bidang pertahanan. Selama lawatan singkat 20 jam di Jakarta, Presiden Putin menandatangani pemberian kredit lunak senilai 1 miliar dolar AS, yang akan digunakan Indonesia membeli persenjataan Rusia, termasuk enam pesawat tempur Sukhoi-30.<sup>31</sup>

Presiden Putin juga menandatangani nota kesepahaman untuk sejumlah kerja sama dalam bidang ekonomi, energi, transportasi, dan peluncuran satelit. Prospek hubungan Rusia-RI diyakini sangat positif, tidak hanya didukung oleh keinginan kerja sama saling menguntungkan saat ini, tetapi juga oleh pengaruh hubungan persahabatan pada masa lalu.

Kalangan generasi tua Rusia dan Indonesia tidak dapat melupakan, sebagaimana disinggung Putin, hubungan akrab Moskwa-Jakarta pada masa lalu. Sekadar memperlihatkan kedekatan hubungan pada masa lalu, Presiden Putin mengingatkan, Uni Soviet (kini Rusia) merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI.

---

<sup>31</sup> “Arus Balik Hubungan Rusia\_RI”, dalam <http://klikpolitik.blogspot.com/2007/09/politik-haruslah-mungkin.html>, diakses 30 Juli 2011.

Hubungan baik masa lalu itu juga terlihat pada pengiriman ahli Uni Soviet membangun pabrik baja Krakatau Steel, jalan di Kalimantan, Rumah Sakit Persahabatan, dan Gelora Bung Karno.<sup>32</sup>

Di atas persahabatan dan kedekatan pada masa lalu itu, kerja sama Rusia-Indonesia dapat dibangun lagi dalam bentuk yang lebih solid. Segala prasangka ideologis sudah terdesak ke belakang oleh kepentingan kerja sama ekonomi dan pertahanan.

Khusus soal pertahanan, Indonesia, sebagaimana dikatakan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, ingin menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara besar, termasuk dalam pengadaan persenjataan.

Di luar masalah bilateral, Putin juga membicarakan tentang kemungkinan Rusia dan Indonesia bekerja sama dalam menciptakan tatanan dunia yang setara, yang menjamin stabilitas dan keamanan global.

Posisi Indonesia yang strategis sebagai negara berpenduduk Islam terbesar dunia dinilai Putin sangat penting dalam mencari perdamaian bersama Rusia, khususnya mendorong sikap saling pengertian di antara penganut agama dan kebudayaan di dunia.

## **2. Kerjasama Teknik Militer Indonesia-Rusia**

Selain kerjasama dalam bidang pertahanan, Indonesia dan Rusia juga melakukan kerjasama dalam bidang Teknik Militer. Hal ini diperkuat oleh seluruh anggota Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang akhirnya menyetujui penyampaian RUU di bidang Pertahanan dari pemerintah Tentang

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

Pengesahan dan persetujuan antara Pemerintah RI dengan Federasi Rusia mengenai kerjasama bidang Teknik Militer.

Persetujuan ini dibacakan oleh Wakil DPR RI, Pramono Anum selaku perwakilan pimpinan DPR didalam forum Sidang Rapat Paripurna DPR RI yang baru memasuki masa Sidang I di Gedung DPR RI, Jakarta.<sup>33</sup>

Pada kesempatan Sidang Rapat Paripurna tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Mahfud Sidiq menyampaikan tiga hal yang terkait dengan pembahasan RUU tersebut. Pertama, bahwa pada dasarnya Komisi I DPR memahami langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terkait kerjasama teknik militer dengan pemerintah Federasi Rusia. Hal ini dikhususkan dalam rangka memenuhi kebutuhan alat system utama persenjataan (Alutsista) bagi TNI.

Kedua, Komisi I DPR RI menilai kerjasama ini merupakan kerjasama tingkat teknik militer dan dengan demikian kerjasama ini dapat dilanjutkan oleh pemerintah melalui Ratifikasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Ketiga mengatakan Komisi I DPR RI memandang perlu untuk dibentuk panitia kerja bersama pemerintah untuk mengkaji dan merumuskan klasifikasi kerjasama bilateral di bidang pertahanan.

Sementara itu Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro dalam Rapat Paripurna saat menyampaikan pendapat akhir Presiden RI, mengatakan perlu dilanjutkan ratifikasi atas persetujuan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia terkait kerjasama teknik militer tersebut dalam bentuk Perpres.

---

<sup>33</sup> “DPR RI Menyetujui RUU Pengesahan dan Persetujuan Kerjasama Teknik Militer RI – Rusia”, dalam [http://www.dmc.kemhan.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=68%3Adpr-ri-menyetujui-ruu-pengesahan-dan-persetujuan-kerjasama-teknik-militer-ri-rusia&Itemid=137](http://www.dmc.kemhan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Adpr-ri-menyetujui-ruu-pengesahan-dan-persetujuan-kerjasama-teknik-militer-ri-rusia&Itemid=137), diakses 30 juli 2011.

Diungkapkan juga oleh Menhan, persetujuan kerjasama teknik militer dengan pemerintah Federasi Rusia ini merupakan pencapaian penting dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama interdependensi antar Negara khususnya kerjasama teknik militer.<sup>34</sup>

Disamping itu diharapkan pada saat diimplementasikannya persetujuan ini dapat meningkatkan pengetahuan kekuatan dan kemampuan militer Indonesia dan membantu merevitalisasi industri strategis pertahanan nasional.

Penyampaian RUU kerjasama Teknik Militer RI – Rusia ini pada awalnya diajukan oleh pemerintah melalui surat Presiden pada tanggal 2 Juni 2010 kepada DPR RI. Dalam hal ini presiden telah menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas RUU bersama anggota Komisi I DPR RI.<sup>35</sup>

Didalam proses pembahasan RUU kerjasama Teknik Militer antara pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia pihak Komisi I DPR telah melaksanakan beberapa tahap pembahasan didalam forum rapat dengar pendapat baik dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kemhan, Kemlu dan Kemkumham maupun dengan para pakar dan akademisi. Didalam forum rapat terdapat masukan-masukan yang berarti, diantaranya adalah dengan adanya kerjasama bilateral tersebut pihak RI dimungkinkan untuk melakukan diversifikasi sumber pengadaan Alutsista bagi penyelenggaraan pertahanan negara.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> “MAJU INDONESIA KU”, dalam [http://www.mik-news.tk/2011\\_08\\_07\\_archive.html](http://www.mik-news.tk/2011_08_07_archive.html), diakses 28 Agustus 2011.